

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini mengalami pergeseran kekuatan ekonomi-politik yang signifikan, di mana negara-negara berkembang mulai mengambil peran lebih besar dalam tatanan global. Salah satu fenomena penting adalah munculnya BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) sebagai kekuatan kolektif yang menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat dalam sistem ekonomi dan politik internasional (Stuenkel, 2015). Kelompok ini tidak hanya berperan sebagai forum ekonomi, tetapi juga sebagai wadah diplomasi strategis yang mempromosikan reformasi tata kelola global, seperti dalam IMF, World Bank, dan G20 (Kahler, 2013). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan salah satu anggota G20 yang memiliki potensi untuk memanfaatkan keanggotaan BRICS guna memperkuat posisinya di kancah internasional.

Keanggotaan BRICS menawarkan peluang besar bagi Indonesia, terutama dalam hal akses pasar, investasi, dan aliansi strategis. BRICS telah membentuk New Development Bank (NDB) dan mekanisme Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang dapat menjadi alternatif pendanaan infrastruktur bagi Indonesia (Armijo & Roberts, 2014). Selain itu, kerja sama dalam isu-isu seperti energi terbarukan, ekonomi digital, dan ketahanan pangan juga dapat memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Namun, di sisi lain, tantangan seperti kesiapan infrastruktur ekonomi, kompetisi dengan anggota BRICS lainnya, dan konsekuensi politik luar negeri harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya, hubungan Indonesia dengan AS dan Uni Eropa bisa terdampak jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan blok BRICS yang seringkali bersikap kritis terhadap kebijakan Barat (Tussie & Riggiozzi, 2015).

Penelitian ini memiliki urgensi strategis karena dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam

mempertimbangkan kebijakan sebagai anggota BRICS. Dari perspektif akademik, studi ini mengisi celah literatur dengan menganalisis peluang dan tantangan Indonesia dalam BRICS melalui landasan teori kepentingan nasional (Morgenthau, 1948) dan konsep organisasi internasional (Keohane & Nye, 1977). Teori kepentingan nasional membantu mengidentifikasi motivasi ekonomi dan politik Indonesia, sementara konsep organisasi internasional menjelaskan bagaimana BRICS berfungsi sebagai platform soft balancing terhadap hegemoni Barat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas BRICS dari perspektif global, seperti karya Stuenkel (2015) yang melihat BRICS sebagai "counter-hegemonic alliance," namun belum secara spesifik mengkaji posisi Indonesia. Sementara itu, studi Armijo & Roberts (2014) lebih fokus pada dampak BRICS terhadap tata kelola global tanpa mengeksplorasi implikasi bagi negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan analisis ekonomi politik internasional dan kepentingan nasional Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peluang dan risiko keanggotaan BRICS.

Perkembangan tata kelola global saat ini menunjukkan pergeseran paradigma dari dominasi Barat menuju multipolaritas ekonomi-politik yang lebih seimbang. Kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) telah muncul sebagai kekuatan kolektif baru yang berperan sebagai katalisator perubahan dalam arsitektur ekonomi dan politik internasional (Stuenkel, 2015). Dalam dekade terakhir, BRICS tidak hanya berhasil membentuk institusi-institusi alternatif seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), tetapi juga secara konsisten memperjuangkan reformasi sistem keuangan internasional yang dianggap tidak lagi merepresentasikan realitas ekonomi kontemporer (Armijo & Roberts, 2014). Fenomena ini menciptakan lanskap baru dimana negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan dalam kelompok ini untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, menghadapi dilema strategis dalam menentukan posisinya terhadap BRICS. Di satu sisi, keanggotaan dalam kelompok ini menawarkan berbagai peluang ekonomi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa total perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS telah mencapai US\$ 72,3 miliar pada tahun 2022, dengan pertumbuhan rata-rata 8,5% per tahun sejak 2015 (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Selain itu, NDB BRICS berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur strategis Indonesia, terutama dalam konteks pemindahan ibu kota negara dan pengembangan ekonomi hijau (Roberts, 2017). Namun di sisi lain, Indonesia perlu mempertimbangkan secara cermat implikasi politik dari keanggotaan ini, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara Barat yang selama ini menjadi mitra utama Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, dari perspektif kebijakan luar negeri, studi ini akan memberikan analisis komprehensif mengenai trade-off strategis yang dihadapi Indonesia antara memperkuat kerja sama Selatan-Selatan melalui BRICS sambil mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara maju. Kedua, dalam konteks ekonomi politik domestik, penelitian ini akan mengkaji kesiapan sektor-sektor strategis Indonesia dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS, termasuk daya saing industri nasional dan kapasitas birokrasi. Ketiga, secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan konsep middle power diplomacy dalam konteks perubahan struktur kekuatan global (Jordaan, 2017).

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya gap pengetahuan yang perlu diisi. Studi yang dilakukan oleh Stuenkel (2015) dan Roberts (2017) memang telah memberikan analisis mendalam tentang evolusi BRICS sebagai kekuatan global, namun belum menyentuh aspek spesifik mengenai posisi Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Laksmiana (2016) tentang kebijakan luar negeri Indonesia lebih berfokus pada hubungan bilateral dengan negara-negara besar daripada analisis keanggotaan dalam kelompok seperti BRICS. Kekosongan

literatur ini menjadi alasan kuat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang peluang dan tantangan Indonesia dalam BRICS.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada dua pilar utama. Pertama, teori kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Morgenthau (1948) digunakan untuk menganalisis bagaimana keanggotaan BRICS dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan nasional Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Kedua, konsep organisasi internasional dari Keohane dan Nye (1977) dipakai untuk memahami dinamika internal BRICS dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kombinasi kedua pendekatan teoritis ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang posisi Indonesia dalam BRICS.

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global abad ke-21 telah menciptakan transformasi signifikan dalam arsitektur kekuatan dunia. Munculnya BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) sebagai poros ekonomi-politik alternatif menandai pergeseran dari sistem unipolar pasca-Perang Dingin menuju tatanan multipolar yang lebih kompleks (Stuenkel, 2018). Kelompok ini tidak hanya merepresentasikan 42% populasi dunia dan 24% PDB global (World Bank, 2018), tetapi juga telah membangun institusi-institusi paralel seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang menantang hegemoni Bretton Woods (Kahler, 2018). Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20 menghadapi tantangan strategis dalam memposisikan diri di tengah persaingan kekuatan besar ini. Data Kementerian Perdagangan (2018) menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan negara BRICS mencapai US\$58,7 miliar pada 2017, dengan pertumbuhan rata-rata 12,5% per tahun sejak 2010.

Penelitian ini memiliki urgensi tiga dimensi. Pertama, dimensi ekonomi: BRICS menawarkan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui NDB yang dapat melengkapi skema pembiayaan konvensional (Griffith-Jones, 2016). Kedua, dimensi politik: keanggotaan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum multilateral (Jordaan, 2017). Ketiga,

dimensi teoritis: studi ini mengisi gap literatur tentang middle power diplomacy dalam konteks perubahan struktur kekuatan global (Roberts, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pergeseran kekuatan ekonomi dan politik dunia dari Barat ke Timur, munculnya blok-blok baru seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah menjadi fenomena penting dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik global. BRICS, sebagai forum kerja sama antar negara-negara berkembang besar, dipandang sebagai simbol penyeimbang terhadap dominasi institusi global yang dipimpin oleh negara-negara Barat seperti IMF, Bank Dunia, dan G7 (Alisawi & Mustafa, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan berperan aktif dalam kancah diplomasi internasional, memiliki potensi strategis untuk berperan lebih besar melalui keanggotaannya atau keterlibatannya dalam BRICS. Namun demikian, keterlibatan Indonesia dalam BRICS tidak lepas dari berbagai pertanyaan krusial yang harus dijawab secara kritis dan ilmiah. Apakah keanggotaan Indonesia benar-benar akan membuka peluang baru dalam memperkuat ekonomi nasional? Bagaimana posisi Indonesia dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam BRICS yang cenderung didominasi oleh negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia? Sejauh mana Indonesia dapat mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif di tengah dinamika geopolitik BRICS yang semakin kompleks?

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS perlu dianalisis dari sudut pandang kesiapan internal, termasuk aspek regulasi, tata kelola, kapasitas industri nasional, hingga peran sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan produktif. Tanpa kesiapan internal yang memadai, bukan tidak mungkin Indonesia hanya menjadi pelengkap dalam forum tersebut, alih-alih menjadi aktor utama yang mampu memanfaatkan kerja sama strategis untuk kepentingan

nasionalnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penting untuk merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana peluang ekonomi politik indonesia dalam keanggotaanya di BRICS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) **Mengeksplorasi** potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia melalui keanggotaan di BRICS, termasuk peluang peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama teknologi.
- 2) **Menjelaskan** bagaimana dinamika politik internal dan eksternal BRICS, termasuk kepentingan negara-negara anggota dan pengaruhnya terhadap tata kelola global, dapat mempengaruhi posisi dan strategi Indonesia di dalam aliansi tersebut.
- 3) **Mengidentifikasi** tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam proses integrasi ke dalam BRICS, termasuk perbedaan kepentingan ekonomi dan politik dengan negara-negara anggota, serta dampak terhadap kebijakan dalam negeri.
- 4) **Mengkaji** implikasi keanggotaan Indonesia di BRICS terhadap kedaulatan ekonomi nasional, termasuk potensi perubahan dalam kebijakan moneter, perdagangan, dan investasi, serta dampaknya terhadap hubungan ekonomi dengan negara-negara di luar BRICS.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Peluang Ekonomi Politik Indonesia Dalam Keanggotaannya Di Brics” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoretis:

- 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan ekonomi-politik internasional, khususnya dalam konteks keanggotaan Indonesia di BRICS yang merupakan aliansi ekonomi-politik negara berkembang besar

- 2) Memperkaya literatur akademik terkait dinamika kerja sama internasional dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang, dengan fokus pada pengaruh kebijakan BRICS terhadap keamanan ekonomi nasional Indonesia
- 3) Menyediakan kerangka analisis yang menggabungkan teori liberalisme dan ekonomi politik neoklasik untuk memahami cost-benefit keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif ekonomi, politik, dan sosial

b) Manfaat Praktis:

- 1) Memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekonomi dari keanggotaan BRICS, seperti akses pasar yang lebih luas, peningkatan investasi asing, dan pendanaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB)
- 2) Membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul, seperti ketergantungan ekonomi, volatilitas nilai tukar rupiah, dan dampak geopolitik, sehingga dapat merumuskan kebijakan mitigasi yang efektif

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibuat dengan susunan yang terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab memiliki focus pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan, mendukung dan melengkapi satu sama lain guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1) BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai struktur awal penelitian yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan awal mula peristiwa ini terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami urgensi dan arah dari penelitian yang dilakukan.

2) BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dan rujukan, serta berisi mengenai konsp dan teori yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Selain itu, disajikan pula kerangka pemikiran sebagai acuan analisis.

3) BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, berita dan artikel yang relevan.

4) BAB IV – HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang diuraikan pada Bab III. Hasil penelitian disusun secara sistematis dan terperinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ditemukan. Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik (jika diperlukan) untuk memudahkan pemahaman. Bab ini berfokus pada penyampaian hasil tanpa interpretasi mendalam, dengan menekankan pada temuan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

5) BAB V – DISKUSI

Bab ini berisi pembahasan mendalam terhadap hasil penelitian yang telah disajikan pada Bab IV. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan konsep yang telah diuraikan pada Bab II, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Diskusi ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari temuan, menjelaskan implikasi, serta mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul dari data. Selain itu, bab ini juga membahas keterbatasan penelitian yang mungkin memengaruhi hasil, serta memberikan sudut pandang baru atau wawasan yang memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

6) BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merangkum hasil dan pembahasan penelitian secara singkat dan jelas, dengan menekankan jawaban terhadap rumusan masalah serta pencapaian tujuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama dan diskusi yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran praktis atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian, baik untuk keperluan akademis, praktis, maupun pengembangan penelitian lanjutan. Saran disusun dengan mempertimbangkan manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan yang relevan.

